

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Luas wilayah benua Asia dan Afrika merupakan separuh wilayah dunia dan penduduknya merupakan tiga per empat total populasi dunia. Selama setengah abad yang lalu, 304 wakil dari 29 negara dan daerah Asia-Afrika mengadakan pertemuan bersejarah di Bandung yang merupakan satu permulaan besar dalam sejarah hubungan internasional. Sejak itu, negara berkembang Asia-Afrika sebagai satu kekuatan yang baru bangkit dan merdeka, lebih kuat naik ke arena internasional. Setelah memasuki abad baru, benua Asia-Afrika yang merupakan dua tempat asal penting peradaban umat manusia, menghadapi peluang baru dalam persatuan, kerja sama dan pembangunan, sementara menghadapi tantangan serius. Di bawah latar belakang itu, pemimpin Asia-Afrika sekali lagi berkumpul di Indonesia, membahas bersama masalah yang sangat penting, yaitu persatuan dan kerja sama Asia-Afrika di bawah situasi baru.

Negara-negara Asia-Afrika memiliki Semangat Bandung tapi kekurangan program aksinya, prosedur serta pertimbangan yang hati-hati. Maka, hubungan kemitraan strategis Asia-Afrika hendaknya termanifestasi pada tiga bidang, yaitu persatuan politik, kerja sama ekonomi, kontak sosial dan kebudayaan. Aksi konkret hendaknya diadakan di tiga jajaran, yaitu pemerintah, organisasi sub-regional dan kalangan rakyat.

Konferensi Asia-Afrika pada 50 tahun yang silam merupakan tonggak penting gerakan pembebasan bangsa Asia-Afrika. Semangat Bandung yakni setiakawan, persahabatan dan kerja sama yang digagasi konferensi itu telah menjadi tenaga penggerak yang kuat selama setengah abad dalam usaha mendorong negara berkembang yang luas berjuang dengan gigih untuk mewujudkan kebangkitan bangsa dan mendorong kemajuan umat manusia.

Untuk membina hubungan kemitraan strategis tipe baru yang stabil dalam jangka panjang, maka negara-negara Asia-Afrika hendaknya menjadi mitra kerja sama yang saling menghormati dan saling mendukung di bidang politik, saling melengkapi dengan keunggulan masing-masing, saling menguntungkan dan menang bersama di bidang ekonomi, saling belajar dari kelebihan pihak lain untuk mengatasi kekurangannya sendiri di bidang kebudayaan, sama derajat dan saling percaya, berdialog dan bekerja sama di bidang keamanan.

Sebagaimana diketahui, perkembangan adalah jalur pokok untuk mensejahterakan rakyat dan mendorong kemajuan sosial, serta merupakan jaminan penting untuk mengukuhkan kemerdekaan politik dan memelihara kestabilan negara. Maka, perkembangan merupakan tugas yang paling urgen bagi negara-negara Asia-Afrika.

B. Tujuan Penelitian

Secara garis besar beberapa tujuan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjawab pokok permasalahan dengan menggunakan landasan teori serta membuktikan kebenaran dari hipotesa berdasarkan hasil dari fakta dan data.
2. Mengetahui bagaimana bentuk kerjasama dari The New Asian African Strategic Partnership (NAASP).
3. Meneliti manfaat dari kerjasama NAASP bagi Indonesia.

C. Latar Belakang Permasalahan

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, good governance dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme dll. Fenomena tersebut diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas, dimana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan,

khususnya bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Semenjak Konferensi Bandung 1955, Negara-negara Asia Afrika telah memperoleh kemajuan politik yang signifikan. Mereka telah dengan sukses melawan kolonialisme dan secara konsisten berperang melawan rasisme. Sebuah jalan berkerikil adalah penghapusan sistem apartheid di Afrika Selatan, dan para pemimpin meyakinkan kembali tujuan mereka untuk menegakkan penghapusan rasisme dan segala bentuk diskriminasi.

Melihat kondisi sekarang ini di Asia dan Afrika, para pemimpin mengakui bahwa mereka harus aktif dalam mengejar pandangan umum dan tindakan kolektif untuk memastikan pembagian yang adil dari keuntungan globalisasi. Mereka menekankan pentingnya dialog internasional untuk memajukan budaya damai, toleransi, dan penghormatan terhadap agama, budaya, bahasa, dan keanekaragaman ras juga keadilan gender.

Para pemimpin memandang sebuah wilayah Asia Afrika dalam damai dan dunia dalam damai pada umumnya, bekerja sama sebagai sebuah konser antar bangsa yang harmonis, tidak eksklusif, terikat dalam sebuah kemitraan yang dinamis, ikatan sejarah yang sama dan kekayaan budaya.

Tujuan untuk menyelenggarakan KTT Asia Afrika tidak hanya berhenti dalam pencapaian relevansi yang berkesinambungan dengan Dasasila Bandung dalam mempromosikan Perdamaian dan Kerja sama Dunia, tapi juga dalam memperkuat dan memperbaharui semangat bangsa Asia Afrika dalam menghidupkan kembali kerja sama Selatan-Selatan.

Kerjasama pasca Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memasuki babak baru setelah dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 22-23 April tahun 2005 di Jakarta. Dalam KTT 2005 para pemimpin Asia Afrika mendeklarasikan The New Asian African Strategic Partnership (NAASP) sebagai cetak biru dalam rangka memperkuat kerjasama negara-negara Asia-Afrika di masa mendatang. Dalam hal ini kerjasama NAASP di fokuskan pada tiga pilar bidang kerjasama yang meliputi Solidaritas Politik, Kerjasama Ekonomi dan Hubungan Sosial Budaya.

Intensitas untuk menghidupkan kembali semangat kerja sama tersebut terpatri di dalam dokumen yang disepakati selama berlangsungnya KTT Asia Afrika di Jakarta pada tanggal 22-23 April 2005, tapi secara resmi dikeluarkan di Bandung pada tanggal 24 April 2005 pada acara penandatanganan NAASP oleh tuan rumah KTT, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki. Ini merupakan dokumen dengan cakupan yang sangat luas yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Negara-negara Asia Afrika dalam mencapai tujuannya. NAASP menandai dimulainya usaha bersama Negara-negara Asia Afrika untuk kebebasan, perdamaian dan kemajuan yang lebih luas. Ini juga merupakan sebuah persetujuan dalam mempererat multilateralisme, dalam mencapai perkembangan ekonomi dengan menghancurkan halangan-halangan yang ada, memajukan perdamaian dan keamanan global, dan memperoleh dukungan kemajuan antara dua region. Para pemimpin juga menyampaikan pemberantasan kemiskinan, terorisme, senjata pemusnah masal, dan pembangunan sistem peringatan awal terhadap tsunami.

Kerja sama di bawah kerangka NAASP berperan sebagai wadah bagi negara-negara anggota untuk berkumpul guna mendiskusikan dan merumuskan program kerja sama. Kerja sama NAASP juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antarnegara Asia-Afrika. Kawasan Asia Afrika adalah wilayah yang dinamis, berkembang, dan menjadi motor kekuatan perekonomian dunia. Indonesia bisa mengekspor produk-produk dari Indonesia ke kawasan Afrika, yang dimana di daerah tersebut tidak memproduksi barang yang sama.¹

Kawasan Asia-Afrika merupakan kawasan yang sangat menjanjikan, pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan ekonomi dunia. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia mencapai 7,3% dan Afrika 4%, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3,1%².

Sejak tahun 2005 Indonesia dan Afrika Selatan menjadi Ketua Bersama (Co-Chairs) NAASP. Dalam mengemban tugas sebagai Co-Chairs, Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mengembangkan NAASP. Indonesia dalam kurun waktu 2006-2011 telah berhasil melaksanakan 26 program di bawah kerangka kerja sama NAASP, antara lain: NAASP-UNEP Workshop on Environmental Law and Policy tahun 2006; Asian African Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore pada tahun 2007, dan Apprenticeship Program for Mozambican Farmers pada tahun 2010. Indonesia

¹ http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/pokok_pokok_pikiran.pdf

² <http://www.ugm.ac.id/new/id/news/dr-sri-adiningsih-kerja-sama-naasp-mampu-tingkatkan-kesejahteraan-negara-asia-afrika>

juga menjadi tuan rumah bagi NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine tahun 2008.³

Komitmen bagi pengembangan NAASP juga dibagi bersama dengan negara-negara peserta NAASP yang lain. Diantaranya, Malaysia telah melaksanakan Training Course for Diplomats tahun 2007 dan Training Course in Disaster Management tahun 2008, serta China yang telah melaksanakan The 5th Training Program for Staff from African Chambers tahun 2009 dan China-Zambia Trade and Investment Forum tahun 2010.⁴

Dengan pandangan untuk memberikan berbagai rekomendasi bagi KTT NAASP, NAASP Senior Officials' Meeting (SOM) diadakan di Jakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2009. Pertemuan ini berhasil membahas beberapa agenda penting, khususnya usulan the 8 Focus Areas of Cooperation yang dimaksudkan sebagai mekanisme panduan untuk mengarahkan berbagai skema kerja sama di bawah rerangka NAASP yang telah dirumuskan dalam KTT AA 2005 ke dalam beberapa kegiatan yang realistis dan bersifat berorientasi pada hasil.

Dalam perkembangannya NAASP menghadapi banyak tantangan, sementara itu dalam waktu yang sama juga menawarkan banyak kesempatan penting. Percampuran antara tantangan dan kesempatan membendung efek-efek dari perubahan sistem internasional dan meningkatnya kompleksitas keruwetan interaksi regional. Dampak-dampak yang beraneka ragam dari globalisasi juga telah menyuguhkan pilihan alternatif derajat pembangunan dan intensitas dari interaksi Negara-negara Asia dan Afrika terutama bagi Indonesia.

³<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=10&P=Regional&l=id>

⁴ Ibid

NAASP merupakan sebuah keputusan yang ambisius. Tantangan dalam menerjemahkan kolaborasi internasional seperti ini menjadi program dan proyek praktis yang kongkret dengan dampak yang nyata terhadap kehidupan masyarakat umumnya.

D. Pokok Permasalahan :

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik suatu pokok permasalahan sebagai berikut :

“ Apa manfaat dari kerjasama NAASP bagi Indonesia?”

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan teori Politik Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional.

1. Teori Politik Luar Negeri

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, suatu negara mempunyai politik luar negeri, yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan negara lain. Output kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan yang diambil atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara.

Politik luar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional karena kepentingan nasional itu dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau

kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang berupa tujuan suatu negara. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep kepentingan nasional (National Interest).

Pada dasarnya politik luar negeri suatu bangsa, sekalipun mengatasnamakan negara, pada haikatnya bukanlah dibuat oleh negara, melainkan aktor atau kelompok yang bertindak atas nama negara.

Dalam UU Nomor:37 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah ditingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia. Sedangkan Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.⁵ Pada tataran praksis seluruh hubungan luar negeri yang dijalin oleh setiap daerah di Indonesia akan diikat dalam perjanjian internasional.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijaksanaan politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

“Foreign Policy is strategy or planed course of action developed by the decision makers of vis a vis other state or international entities, aimed as achieving specific goals defined in term of national interest.”

⁵http://www.deptan.go.id/kln/daftar_phln/UU%201999%20No%2037%20ttg%20Hubungan%20Internasional.pdf

Dalam urusan tersebut, politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik lain atau unit internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus yang dituangkan dalam kepentingan nasional. Dari definisi diatas, jelaslah bahwa kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang menyangkut tentang politik luar negeri berada di tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini aktor pengambilan keputusan terletak ditangan Perdana Menteri dan Presiden.

2. Konsep Kepentingan Nasional.

Konsep Kepentingan Nasional adalah konsep yang paling umum digunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Konsep ini dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam Politik Internasional.

Menurut Hans. J Morghentau, kepentingan nasional merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain.⁶ Hubungan kekerasan atau pengendalian bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan dan kerjasama.

Sedangkan konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan

⁶ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 163.

nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.⁷ Hal ini mengartikan bahwa, kasus politik luar negeri dapat saja merupakan masalah kelangsungan hidup, masalah keamanan, masalah ekonomi, keamanan ataupun politik suatu negara-bangsa. Masalah-masalah tersebut dapat mengemuka menjadi masalah politik luar negeri apabila penyelesaiannya memerlukan dimensi luar-negeri, apabila kekuatan nasional negara-bangsa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya.

Sebaliknya, apabila masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan oleh kekuatan nasional, dengan tidak memerlukan aspek luar negeri, maka apapun yang menjadi pemicunya tidak dapat dianggap sebagai politik luar negeri. Masalah kelangsungan hidup negara bangsa misalnya, tidak selalu berarti bahwa yang mengemuka berasal dari luar atau harus selalu melalui bantuan luar negeri (asing). Kasus pemberontakan, separatisme ataupun subversi lainnya, dapat saja ditumpas oleh kekuatan militer nasional negara bangsa yang bersangkutan.

Kepentingan nasional setiap negara pada umumnya meliputi berbagai hal seperti integritas nasional, melindungi martabat nasional Negara serta membangun kekuasaan.⁸ Kepentingan nasional suatu Negara timbul akibat

⁷ Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd. England, 1982, hlm. 7

⁸ Carlton, Clymer Rodee Dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.501-5-4.

terbatasnya sumber daya nasional atau kekuatan nasional, sehingga Negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas Negeranya.⁹ Berdasarkan konsep kepentingan nasional tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku serta tindakan yang diambil oleh pemimpin politik terhadap masalah-masalah domestic maupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional Negara mereka terhadap masyarakat internasional.

Dalam pembahasan mengenai politik luar negeri Indonesia ini, unsur-unsur yang vital bagi negara Indonesia adalah mencakup kesejahteraan ekonomi. Maka akan ada upaya dari Indonesia yang perlu diperjuangkan dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.

Dari konsep kepentingan nasional diatas, maka pada dasarnya kepentingan suatu bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari dua tujuan utama yaitu kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan (welfare).

Setiap negara didunia pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut meliputi upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik secara keseluruhan/individu tersebut dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang.

Kepentingan nasional sebuah Negara salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memajukan dan

⁹ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hal.29.

mengembangkan ekonomi negaranya. Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis balik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut atau sasaran tersebut, maka diperlukan strategi yang matang.

Melalui kerjasama NAASP, Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar dalam bidang perekonomian dengan berbagai macam kerjasama dengan Negara-negara di Afrika karena kawasan tersebut cukup menjanjikan dan Indonesia dapat meningkatkan postur politik dan kredibilitas di mata dunia. Hal tersebut mampu menaikkan posisi tawar Indonesia di mata dunia serta membantu Indonesia dalam memainkan peran yang lebih sentral dalam hubungan masyarakat dunia.

F. Hipotesa

Serangkaian latar belakang dan persoalan yang telah dirumuskan serta konsep yang ditawarkan pada bagian pembahasan sebelumnya, maka mendorong penulis untuk merumuskan hipotesa:

1. Manfaat di bidang politik: meningkatkan citra Indonesia di mata negara-negara Afrika
2. Manfaat di bidang ekonomi : meningkatkan arus perdagangan dengan negara Afrika secara signifikan.
3. Manfaat di bidang budaya: sebagai sarana diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Fokus utama dari penulisan ini adalah membahas peran pemerintah Indonesia dalam The New Asian-Afrika Strategic Partneship. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan diluar batasan tersebut. Menengok kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dengan catatan diperhatikan relevansinya.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan baik jika disertai faktor dan sistem metodologi yang baik. Penulisan ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui study kepustakaan (library research), berdasarkan data-data sekunder baik dari buku, majalah, jurnal, artikel, surat kabar, internet, maupun bentuk-bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan objek penulisan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika penulisan dari skripsi yang penulis angkat adalah:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II : Bab ini menjelaskan tentang bagaimana New Asian-Afrika Strategic Partnership dan perkembangannya.
- BAB III : Bab ini menjelaskan bagaimana peranan Indonesia dalam kerjasama New Asian Africa Strategic Partnership.
- BAB IV : Bab ini menjelaskan manfaat dari kerjasama New Asian Africa Strategic Partnership bagi Indonesia.
- BAB V : Penutup, berisi kesimpulan.